

ABSTRAK

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi masalah yang krusial dan memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah untuk segera diselesaikan, untuk mengatasi itu Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPA DP3APM) Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi terkait bagaimana mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan apa yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif analisis dengan menelaah data yang telah dikumpulkan yang didukung dengan hasil wawancara dengan fokus penelitian. Penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Winarno (2014) yaitu: Standar dan sasaran kebijakan/Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap para pelaksana dan komunikasi antar organisasi. Hasil penelitian yang diperoleh ialah masih adanya kendala dalam aspek SDM yang masih kompleks, anggaran dana terbatas, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan keberadaan UPA PPA DP3APM Kota Medan, dan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan ialah SDM yang tersedia masih kurang, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan keberadaan dan fungsi UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai lembaga perlindungan korban kekerasan, dan anggaran dana dari pemerintah yang masih terbatas.

Kata Kunci :*Kekerasan, Implementasi Kebijakan, Perlindungan, Kasus.*

ABSTRACT

Cases of violence against women and children have become a crucial problem and require extra attention from the government to be resolved immediately, to overcome this, the Government stipulates North Sumatra Regional Regulation No. 3 of 2019 concerning the protection of women and children victims of violence. Therefore, researchers are interested in examining the Implementation of Regional Regulation Policy No. 3 of 2019 concerning the protection of women and children from acts of violence at the UPT for the Protection of Women and Children of the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment (PPA DP3APM) Medan City. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation related to how to implement Regional Regulation No. 3 of 2019 concerning the protection of women and children from acts of violence and what are the obstacles faced by UPT PPA DP3APM Medan City in implementing the policy. The data obtained from this research was analyzed descriptively by examining the data that had been collected which was supported by the results of interviews with the research focus. The author uses the theory of Policy Implementation from Donald Van Meter and Carl Van Horn in Winarno (2014), namely: Policy standards and objectives / Measures and policy objectives, resources, attitudes of implementers and inter-organizational communication. The results of the research obtained are that there are still obstacles in the aspect of human resources that are still complex, limited budget funds, and lack of public understanding of the functions and existence of UPA PPA DP3APM Medan City, and obstacles in implementing policies are the lack of available human resources, lack of public understanding and knowledge of the existence and function of UPT PPA DP3APM Medan City as an institution for the protection of victims of violence, and limited budget funds from the government

Keywords: *Violence, Policy Implementation, Protection, Cases*